

KAJIAN POTENSI PENGEMBANGAN AGRIBISNIS SAYURAN DATARAN TINGGI DI KABUPATEN BANJARNEGARA PROPINSI JAWA TENGAH

Pujiharto

Fakultas Pertanian

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. Raya Dukuwaluh PO BOX 202 Purwokerto

ABSTRAK

Kebijakan otonomi daerah akan mendorong setiap kabupaten untuk memproduksi berbagai komoditas pertanian dalam kerangka swasembada dan dituntut mengurangi ketergantungan kebutuhan pangan terhadap daerah lain. Kabupaten Banjarnegara mempunyai potensi besar sebagai produsen komoditas pertanian terutama sayuran dataran tinggi. Namun potensi yang besar sebagai sentra produksi sayuran dataran tinggi tersebut masih menghadapi berbagai macam permasalahan terkait dengan belum terwujudnya ragam, kualitas, kesinambungan pasokan, dan jumlah produksi yang diminta konsumen. Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengkaji potensi, tantangan, permasalahan, pola kemitraan dan konsep pengembangan agribisnis Sayuran Dataran Tinggi di Kabupaten Banjarnegara.

Kata Kunci : *pengembangan agribisnis, sayuran dataran tinggi, Kabupaten Banjarnegara*

PENDAHULUAN

Sektor pertanian di Indonesia memiliki peran strategis dalam perkembangan struktur perekonomian nasional. Selain sebagai penghasil pangan dan pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB), sektor pertanian juga menyerap tenaga kerja terbesar terutama di pedesaan, sumber bahan baku industri, cadangan devisa dan pendapatan masyarakat. Oleh sebab itu sektor ini layak menjadi sektor andalan (Departemen Pertanian, 2006).

Komoditas hortikultura, khususnya sayuran mempunyai beberapa peranan strategis, antara lain: (1) sumber bahan makanan bergizi bagi masyarakat yang kaya akan vitamin dan mineral; (2) sumber pendapatan dan kesempatan kerja, serta kesempatan berusaha; (3) bahan baku agroindustri; (4) sebagai komoditas potensial ekspor yang merupakan sumber devisa negara; dan (5) pasar bagi sektor non pertanian, khususnya industri hulu.

Kelompok komoditas sayuran sangatlah strategis maka perlu memperoleh prioritas pengembangan. Hal ini dilandasi dari sisi permintaan, berupa konsumsi segar maupun olahan meningkat dari waktu ke waktu seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, pendapatan masyarakat dan berkembangnya pusat kota-industri-wisata. Sementara itu dari sisi produksi masih berpotensi untuk terus ditingkatkan, baik melalui peningkatan intensitas tanam maupun peningkatan produktivitas melalui intensifikasi usahatani. Berikut adalah data produksi beberapa macam sayuran dataran tinggi di Indonesia:

Jika dilihat dari Tabel 1, tahun 2004 sampai tahun 2008 produksi sayur dataran tinggi mengalami fluktuasi. Walaupun angka produksi beberapa sayuran dataran tinggi sudah mengalami peningkatan tetapi belum memenuhi kebutuhan konsumsi sayuran masyarakat di Indonesia. Rachman (1997) menyebutkan bahwa tingkat konsumsi sayuran pada golongan pendapatan rendah rata-rata 25,8 kg/kapita/tahun setara 70,7 gr/kapita/hari, idealnya konsumsi sayuran adalah diatas 100 gr/kapita/hari per orang. Sedangkan menurut catatan Direktorat Jenderal Tanaman Hortikultura Departemen

Tabel 1. Produksi Beberapa Jenis Sayuran Dataran Tinggi di Indonesia

Tahun	Kentang (ton)	Kubis (ton)	Bawang Daun (ton)	Wortel (ton)	Tomat (ton)
2004	1.027.040	1.432.814	475.571	423.722	626.872
2005	1.009.619	1.292.984	501.437	440.002	647.020
2006	1.011.911	1.267.745	571.268	391.371	629.744
2007	1.003.732	1.288.738	479.924	350.170	635.475
2008	1.071.543	1.323.702	547.743	367.111	725.973

Sumber : BPS Pusat (2009), Departemen Pertanian (2009) diolah

Pertanian (2008), konsumsi sayuran pada tahun 2008 baru sebesar 40,9 kg/kapita/tahun setara dengan 112 gr/kapita/hari. Seharusnya menurut standar lembaga pangan dan pertanian dunia (FAO) konsumsi sayuran yang ideal adalah sebesar 65,75 kg/kapita/tahun. Setara 180 gr/kapita/hari. Jika dikalikan dengan jumlah penduduk Indonesia, maka fakta ini mengindikasikan bahwa pangsa pasar domestik untuk komoditi sayuran di Indonesia masih terbuka lebar.

Liberalisasi perdagangan yang makin menguat dewasa ini memberikan peluang-peluang baru sekaligus tantangan-tantangan baru yang harus dihadapi. Dari segi permintaan pasar, liberalisasi perdagangan memberikan peluang-peluang baru akibat pasar yang semakin luas sejalan dihapuskannya berbagai hambatan perdagangan antar negara. Namun liberalisasi perdagangan juga menimbulkan masalah-masalah serius jika komoditas yang diproduksi secara lokal tidak mampu bersaing di pasar dunia.

Era otonomi daerah akan mendorong setiap kabupaten untuk memproduksi berbagai komoditas pertanian dalam kerangka swasembada dan dituntut mengurangi ketergantungan kebutuhan pangan terhadap daerah lain. Kabupaten Banjarnegara mempunyai potensi besar sebagai produsen komoditas pertanian terutama sayuran dataran tinggi. Namun potensi yang besar sebagai sentra produksi sayuran dataran tinggi, masih menghadapi berbagai macam permasalahan.

Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengkaji beberapa hal antara lain: (1) Potensi agribisnis sayuran dataran tinggi di Kabupaten Banjarnegara; (2) Tantangan pengembangan agribisnis sayuran dataran tinggi di Kabupaten Banjarnegara; (3) Permasalahan pengembangan agribisnis sayuran dataran tinggi di Kabupaten Banjarnegara; (4) Pola kemitraan usaha komoditas sayuran dataran tinggi di Kabupaten Banjarnegara; (5) Konsep pengembangan agribisnis sayuran

dataran tinggi di Kabupaten Banjarnegara.

POTENSI AGRIBISNIS SAYURAN DATARAN TINGGI

Dengan diberlakukannya UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi berbagai perubahan pada kelembagaan pemerintahan di tingkat Kabupaten. Sejalan dengan otonomi daerah tersebut terjadi pula perubahan besar pada aspek permintaan komoditas pertanian termasuk produk sayuran dataran tinggi, prospek permintaan domestik terus meningkat baik dalam bentuk konsumsi segar maupun olahan (Saptana dkk. 2005).

Banjarnegara adalah salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah bagian barat dengan luas wilayah 106,970,99 Ha (97,94% merupakan tanah subur) terdiri dari 20 Kecamatan 273 Desa dan 5 Kelurahan. Jumlah Penduduk Kabupaten Banjarnegara terdiri dari Laki-laki: 430.670 Orang dan Wanita: 431.813 Orang (Kabupaten Banjarnegara dalam Angka, 2009).

Wilayah Kabupaten Banjarnegara dibagi 3 zona yaitu zona utara, tengah dan selatan. Zona utara merupakan wilayah pegunungan yang lebih dikenal dengan pegunungan kendeng utara, rona alamnya berbukit, bergelombang dan curam. Potensi utamanya adalah sayuran dataran tinggi antara lain: kentang, kubis, bawang daun, wortel dan tomat. Ada juga jenis sayuran dataran tinggi yang diusahakan di zona ini tetapi tidak dominan seperti: caisin, petsai, cabai, dan lobak.

Sentra produksi sayuran dataran tinggi di Kabupaten Banjarnegara meliputi 4 kecamatan yaitu (1) Kecamatan Batur pusat produksi kentang, kubis, bawang daun dan wortel meliputi Desa Batur, Sumberejo, Pasurenan, Bakal, Dieng Kulon, Karang Tengah, Kepakisan, dan Pekasiran; (2) Kecamatan Pejawaran pusat produksi kentang, kubis, bawang daun, wortel dan tomat meliputi Desa Condong Campur, Gembol, Sidengok, Grogol, Beji, Ratamba; (3) Kecamatan Wanayasa pusat produksi kentang,

kubis, bawang daun, wortel dan tomat meliputi Desa Balun, Wanayasa, Pesantren, Jatilawang, Wanaraja, Kasimpar, Penanggungan, Legok Sayem; dan (4) Kecamatan Karang Kobar pusat produksi kubis, bawang daun dan tomat meliputi Desa Lesana, Karang Kobar, Purwodadi, Sampang, Binangun, Ambal, Karanggondang, Slati, Njlegong.

Pada tahun 2009 Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu penyumbang terbesar produk kentang Jawa Tengah mencapai 133.309 ton atau 44,2% dari total produksi kentang Jawa Tengah sebanyak 301.650 ton. Sedangkan produksi kubis Kabupaten Banjarnegara mencapai 141.256,91 ton atau 59,37% dari total produksi kubis Jawa Tengah sebesar 237.909 ton (BPS

Propinsi Jawa Tengah, 2010). Berikut produksi beberapa jenis sayuran dataran tinggi dominan di empat kecamatan sebagai sentra produksi.

Sarana dan prasarana penunjang pengembangan agribisnis sayuran dataran tinggi di Kabupaten Banjarnegara antara lain: (1) perdagangan, jumlah pasar di Kabupaten Banjarnegara tercatat 23 pasar produk pertanian terutama sayuran, terdapat satu STA (Sub Terminal Agribisnis) JAKABAYA (Pejawaran, Karang Kobar, Batur, Wanayasa); (2) koperasi, jumlah koperasi yang bergerak dibidang pertanian 81 buah dari total jumlah koperasi 293 buah; (3) jalan, panjang jalan Kabupaten tercatat sepanjang 710.747 km. pembangunan sarana

Tabel 2. Produksi Sayuran Dataran Tinggi di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009

Kecamatan	Kentang (ton)	Kubis (ton)	Bawang Daun (ton)	Wortel (ton)	Tomat (ton)
Batur	74.001,00	36.186,00	545,00	742,00	-
Pejawaran	50.400,00	104.000,00	77,60	4.050,00	63,00
Wanayasa	8.908,00	532,80	86,67	39,00	162,25
Karang Kobar	-	538,11	81,20	-	50,40

Sumber: BPS Kabupaten Banjarnegara (2009) diolah.

jembatan dan jalan terus diupayakan untuk memperlancar transportasi warga dan hasil-hasil pertanian; (4) angkutan darat, jumlah dan rute angkutan darat terus bertambah dari tahun ke tahun, hal ini dapat memperlancar transportasi hasil pertanian; (5) perbankan, ada fasilitas kredit pertanian yang dikembangkan oleh Pemda Banjarnegara (terutama untuk sayuran *high value commodity* seperti kentang) disamping kredit yang dikucurkan lewat BRI dan Bank Surya Yudha; (6) hotel dan pariwisata, berpengaruh terhadap permintaan konsumsi produk sayuran dataran tinggi (Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Banjarnegara, 2007).

TANTANGAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS SAYURAN DATARAN TINGGI

Sejalan dengan perubahan tatanan politik dan otonomi daerah yang mengarah pada era demokratisasi serta perubahan tatanan dunia yang mengarah pada globalisasi dan

liberalisasi, maka pengembangan sayuran dataran tinggi dimasa datang dihadapkan pada dua tantangan. Secara rinci kedua tantangan tersebut disajikan dalam Tabel 3 dan Tabel 4 (Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Banjarnegara, 2005); Departemen Pertanian (2009); Saptana dkk. (2005). Tantangan pertama adalah tantangan internal yang berasal dari domestik, dimana pengembangan agribisnis sayuran dataran tinggi dituntut untuk mengatasi masalah-masalah yang ada (Tabel 3).

Sedangkan tantangan kedua adalah tantangan eksternal, dimana pengembangan agribisnis sayuran dataran tinggi diharapkan mampu mengatasi masalah pada era globalisasi dan liberalisasi. Tantangan kedua disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 3. Tantangan Internal Pengembangan Agribisnis Sayuran Dataran Tinggi

Tantangan	Masalah yang Dihadapi	Isu Pengembangan Agribisnis Masa Datang
1. Otonomi daerah/ pemberdayaan wilayah	1. Pemberdayaan pengelolaan wilayah	1. Pengembangan agribisnis yang mampu menumbuhkan kembangkan perekonomian wilayah 2. Penyiapan SDM yang terampil dan ahli
	2. Pengembangan infrastruktur oleh daerah	1. Pengembangan infrastruktur untuk menunjang kelancaran agribisnis
	3. Kelestarian sumberdaya	1. Pengembangan jenis komoditas unggulan spesifik lokal 2. Tuntutan peran serta wilayah dalam menjaga kelestarian lingkungan
	4. Pengembangan akses lokal dan global	1. Promosi pengembangan pasar sayuran terhadap akses pasar internasional 2. Tuntutan kelembagaan di wilayah untuk akses pasar internasional
2. Tantangan pemberdayaan petani	1. Pemberdayaan dalam pemanfaatan sumberdaya	1. Pemberdayaan kesempatan usaha yang lebih luas untuk pemanfaatan sumberdaya
	2. Pemberdayaan terhadap penguasaan faktor produksi	1. Peningkatan teknologi usaha pertanian bagi petani 2. Peningkatan aksesibilitas petani terhadap kredit
	3. Pengembangan posisi tawar petani	1. Peningkatan aksesibilitas informasi pasar terhadap petani 2. Pemberdayaan kelembagaan petani untuk meningkatkan posisi tawar yang disesuaikan dengan karakteristik lokal
	4. Pemberdayaan kelompok tani	1. Meningkatkan peran kelembagaan petani selaku pengambil inisiatif dalam pengambilan keputusan guna perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan sumberdaya di wilayahnya

Tabel 4. Tantangan Eksternal Pengembangan Agribisnis Sayuran Dataran **Tinggi**

Tantangan	Masalah yang Dihadapi	Isu Pengembangan Agribisnis Masa Datang
1. Globalisasi	1. Ketergantungan produk pertanian di pasar global (peningkatan volume permintaan, harga input produksi lebih murah)	1. Promosi ekspor dan peningkatan pengembangan ekspor ke negara potensial. 2. Efisiensi dalam usaha pertanian
	2. Kelestarian lingkungan hidup	1. Tuntutan pengembangan pertanian yang memperhatikan kelestarian sumberdaya
	3. Globalisasi arus informasi pasar hasil pertanian	1. Tuntutan informasi pasar hasil pertanian yang mudah diakses secara cepat oleh petani 2. Tuntutan sistem pemasaran lebih cepat
2. Liberalisasi	1. Liberalisasi investasi sektor pertanian	1. Pengembangan agribisnis sayuran dataran tinggi domestik yang mampu bersaing dengan usaha infestasi dari negara lain
	2. Liberalisasi perdagangan	1. Agribisnis sayuran dataran tinggi harus mampu hidup mandiri tanpa tergantung proteksi pemerintah
	3. Persaingan bebas berdasarkan keunggulan produk	1. Tuntutan efisiensi usaha pertanian agar mempunyai daya saing di pasar internasional
3. Perubahan selera konsumen	1. Permintaan produk bebas residu pestisida	1. Mengurangi penggunaan pestisida dengan cara pengendalian hama terpadu (PHT)
	2. Permintaan kualitas produk yang baik	1. Tuntutan peningkatan kualitas produk baik ditujukan untuk pasar domestik maupun internasional
4. Perubahan teknologi	1. Perkembangan teknologi pertanian	1. Tuntutan peningkatan teknologi pertanian sesuai dengan perkembangan

Dari kedua tantangan tersebut membawa implikasi bahwa produk sayuran dataran tinggi agar mampu bersaing di pasar internasional harus memenuhi persyaratan keharusan (*necessary condition*), yakni: dihasilkan dengan biaya rendah, memberikan nilai tambah yang tinggi, mempunyai kualitas tinggi, mempunyai keragaman untuk berbagai segmen pasar, mampu mensubstitusi produk sejenis (*impor*). Dalam rangka menciptakan struktur agribisnis yang tangguh, maka agribisnis yang terdiri dari subsistem sarana produksi, usahatani, agroindustri, dan pemasaran, dalam era liberalisasi perdagangan haruslah dipadukan dalam keutuhan sistem. Oleh karena itu efisiensi dalam segala sub-sistem harus dilakukan.

PERMASALAHAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS SAYURAN DATARAN TINGGI

Permasalahan pokok dalam pengembangan agribisnis sayuran dataran tinggi di Kabupaten Banjarnegara dapat dikelompokkan

dalam beberapa (Pujiharto, 2011) antara lain:

1. Aspek teknis produksi
 - (a) rendahnya sumber daya petani;
 - (b) terbatasnya teknologi (pembibitan, budidaya, pasca panen);
 - (c) kurangnya bimbingan dan penyuluhan untuk komoditas sayuran dataran tinggi pada era otonomi daerah ini;
 - (d) pengembangan infrastruktur belum didasarkan pada cakupan wilayah layanan dan pemasaran;
 - (e) tingkat adopsi teknologi yang bervariasi antar petani maupun kelompok tani, penggunaan pestisida yang berlebih. Akibat permasalahan tersebut maka secara umum belum mampu menghasilkan sayuran sesuai dengan permintaan pasar dan berkesinambungan.
2. Aspek kelembagaan
 - (a) belum optimalnya fungsi kelompok tani;
 - (b) masih rendahnya kesadaran pelaku agribisnis untuk membentuk lembaga; dan
 - (c) belum terbangun sistem informasi antar sentra produksi sayuran dataran

tinggi; (d) belum maksimalnya dukungan lembaga perbankan terhadap pengembangan agribisnis, baik dari aspek permodalan maupun suku bunga.

3. Aspek pemasaran

(a) jumlah pedagang pengumpul, pedagang besar sedikit dan eksportir sangat terbatas (saat ini hanya produk kentang yang tidak bermitra dengan PT. IFM, diekspor ke Malaysia dan Brunei); (b) petani cenderung menghadapi struktur pasar oligopolistik pada pasar input (bibit, pupuk, obat-obatan) dan oligopsonistik pada pasar output; (c) kurangnya sarana dan prasarana untuk fasilitas pemasaran (STA, fasilitas pendukung di STA, *cold storage*); (d) pelaku agribisnis belum siap menghadapi perdagangan bebas baik dalam hal pemenuhan (jumlah, mutu, dan kesinambungan pasokan); (e) belum berkembangnya industri pengolahan berbahan baku sayuran; (f) adanya fluktuasi harga sayuran sebagai akibat (panen yang bersifat

musiman dan belum ada pola pengaturan produksi); (g) terhambatnya ekspor karena mutu, residu pestisida yang tinggi dan kontinuitas produk; (h) kurangnya upaya promosi pasar di luar negeri; (i) kurangnya dukungan pemerintah daerah untuk merangsang dan mempermudah akses pasar.

Lebih lanjut Saptana dkk. (2005) mengkaji permasalahan pokok yang dihadapi dalam pengembangan komoditas sayuran dataran tinggi secara umum disebabkan faktor-faktor berikut: (1) pola kepemilikan lahan yang sempit dan tersebar, tidak adanya sistem pengwilayahan dan adanya konversi lahan ke non pertanian; (2) rendahnya penguasaan teknologi, dari pembibitan, sistem usahatani, panen dan pasca panen; (3) produktivitas dan mutu yang masih rendah; (4) fluktuasi harga produk sayuran sangat tajam yang tidak hanya terjadi antar musim tetapi antar bulan, dan terkadang fluktuasi harian; (5) sistem pemasaran yang belum efisien karena rantai tataniaga yang panjang; (6) lemahnya permodalan

petani, sementara itu budidaya sayuran tergolong padat modal; (7) kelembagaan petani yang belum optimal; dan (8) kurangnya informasi bagi pengusaha swasta (*investor*) tentang kelayakan finansial dan ekonomi usahatani sayuran, khususnya kentang dan kubis.

Beberapa alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain: (1) pengembangan komoditas unggulan berdasarkan spesifik lokal, pengembangan kawasan untuk menjalin kerjasama antar produsen dan pelaku agribisnis lainnya serta antar sentra produksi dengan sentra pemasaran yang memiliki karakteristik sumberdaya dan penanganan yang sama; (2) pengembangan mutu produk yang diarahkan untuk memenuhi standar mutu baik untuk konsumsi, bahan baku industri maupun ekspor; (3) pengembangan mutu benih dan sarana produksi; (4) pengembangan perlindungan tanaman yang diarahkan pada prinsip pengendalian hama terpadu; (5) pengembangan kelembagaan baik ditingkat petani

maupun wilayah; (6) peningkatan kompetensi petugas dan petani; (7) pemasaran produk, dan (7) pengembangan sistem informasi manajemen.

POLA KEMITRAAN USAHATANI SAYURAN DATARAN TINGGI

Pola kelembagaan kemitraan usaha komoditas sayuran dataran tinggi di Kabupaten Banjarnegara adalah: (1) pola dagang umum untuk komoditas kubis, bawang daun, wortel dan tomat serta produk lain seperti caisin, petsai, cabai, dan lobak (2) pola kemitraan pembinaan dan kredit bibit antara PT. Indofood Fritolay Makmur (IFM) dengan petani baik secara individu maupun kelompok dalam usahatani kentang Varietas Atlantic (Pujiharto, 2011).

Pelaku yang terlibat dalam kelembagaan kemitraan pola dagang umum komoditas sayuran dataran tinggi melibatkan petani, pelaku tataniaga pada berbagai tingkatan, jasa angkutan, lembaga keuangan formal dan informal, dan instansi pemerintah.

Petani merupakan pelaku yang memiliki peranan sentral terutama terkait dengan posisi dan perannya dalam memproduksi produk sayuran.

Pola dagang umum antara petani sayuran dengan pedagang umumnya dilakukan melalui kesepakatan informal yang bersifat fleksibel. Ada empat sistem pembelian, yaitu tebasan, ijon, tunai, dan tempo. Harga ditentukan berdasarkan kesepakatan atau tawar menawar, di mana posisi pedagang lebih dominan dibandingkan petani. Cara pembayaran ke petani dan antar pedagang umumnya dilakukan setelah penyerahan barang. Sebagian besar petani telah terikat dengan pedagang melalui bentuk ikatan hutang-piutang untuk membeli sarana produksi. Petani berhutang pada pedagang dalam bentuk uang tunai, dan akan dibayar dari hasil panen. Pembayaran oleh pedagang kepada petani dilakukan setelah pedagang yang bersangkutan menerima pembayaran dari pedagang di atasnya.

Pola kemitraan usaha pembinaan dan kredit bibit kentang

antara PT. Indofood Fritolay Makmur (IFM) dengan petani dikembangkan di wilayah Kabupaten Banjarnegara meliputi Kecamatan Batur, Pejawaran, Wanayasa. Beberapa kewajiban PT. Indofood Fritolay Makmur adalah: (1) menyediakan bibit kentang Varietas Atlantic dengan kualitas terjamin berasal dari Scotlandia atau Australia; (2) menyediakan sarana produksi lain bagi yang memerlukan yang bersifat mengikat dan dibayarkan pada saat panen; (3) melakukan pembinaan teknis budidaya dengan pendampingan seorang *Agro-Supervisor*; dan (4) menampung hasil dari petani dengan harga dan spesifikasi produk yang telah disepakati. Sementara itu, petani atau kelompok tani berkewajiban: (1) membeli bibit kentang varietas Atlantic yang disediakan oleh perusahaan mitra; (2) melakukan budidaya kentang Atlantic sesuai anjuran; dan (3) menjual hasil kepada perusahaan mitra, serta (4) membayar kredit bibit dengan sistem bayar setelah panen dengan cara dipotong pada saat penyerahan barang.

Hak perusahaan mitra adalah mendapatkan jaminan produksi atau bahan baku baik dari segi jumlah, kualitas, dan kontinuitas berdasarkan kesepakatan. Petani Mitra memiliki hak atas jaminan harga dan pasar sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Terdapat sanksi (*punishment*) jika terjadi pelanggaran atas kesepakatan, misalnya ditemukan penjualan hasil ke luar, maka petani tersebut akan dikeluarkan dari keanggotaan dalam kemitraan usaha. Pola interaksi dilakukan secara tatap muka terutama pada saat sosialisasi, perencanaan dan melakukan kesepakatan-kesepakatan.

KONSEP PENGEMBANGAN AGRIBISNIS SAYURAN DATARAN TINGGI

Secara umum Agribisnis berasal dari kata *Agribusiness*, di mana *Agri=Agriculture* artinya pertanian dan *Business* artinya usaha atau kegiatan yang menghasilkan keuntungan. Jadi, Agribisnis adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan tumbuhan dan hewan (komoditas pertanian, peternakan, perikanan, dan

kehutanan) yang berorientasi pasar (bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pengusaha sendiri) dan perolehan nilai tambah.

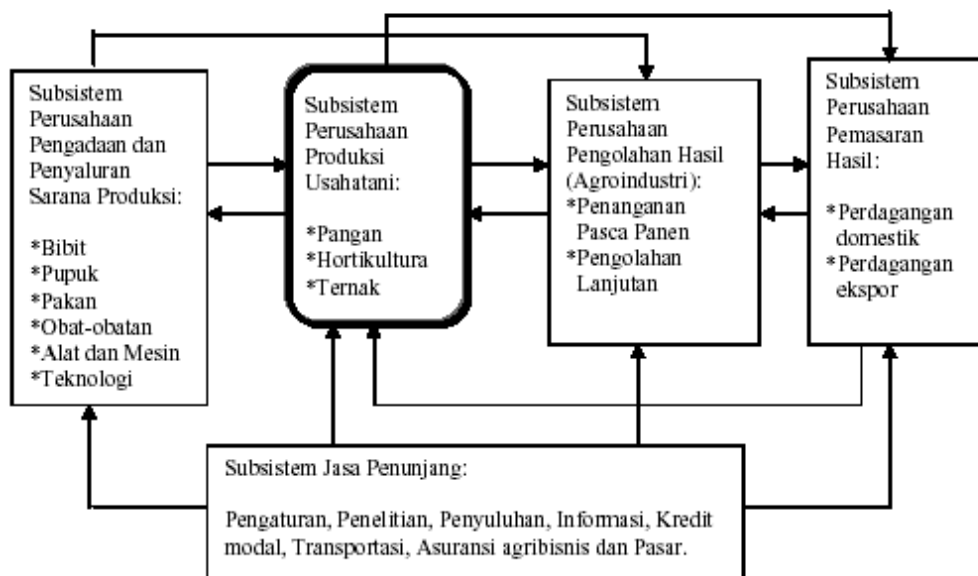
Agribisnis merupakan konsep dari suatu sistem yang integratif dan terdiri dari beberapa sub-sistem, yaitu: (1) sub-sistem pengadaan sarana produksi (agroindustri hulu); (2) sub-sistem produksi usahatani; (3) subsistem pengolahan dan industri hasil pertanian (agroindustri hilir); (4) sub-sistem pemasaran dan perdagangan; dan (5) sub-sistem kelembagaan penunjang (Downey and Erickson, 1992); (Saragih, 1999).

Sejalan dengan pengertian tersebut, Departemen Pertanian (2001) mengedepankan konsep “perusahaan dan sistem agribisnis”, yakni subsistem agribisnis hulu (perusahaan pengadaan dan penyaluran sarana produksi), subsistem agribisnis tengah (perusahaan usahatani), subsistem agribisnis hilir (perusahaan pengolahan hasil atau agroindustri dan perusahaan pemasaran hasil, serta subsistem jasa penunjang (lembaga keuangan, transportasi,

penyuluhan dan pelayanan informasi agribisnis, penelitian kaji terap, kebijakan pemerintah, dan asuransi agribisnis) perusahaan atau lembaga bisnis. Masing-masing perusahaan tersebut merupakan “perusahaan agribisnis” yang harus dapat bekerja secara efisien, selanjutnya semua perusahaan agribisnis tersebut harus melakukan hubungan kebersamaan dan saling ketergantungan dalam suatu sistem untuk lebih meningkatkan efisiensi usaha dan mencapai tujuan agribisnis (Gambar 1).

Fungsi subsistem agribisnis dalam sistem agribisnis masing-masing adalah sebagai berikut:

- (1) sub-sistem pengadaan sarana produksi berfungsi menghasilkan dan menyediakan sarana produksi pertanian agar mampu menghasilkan produk usahatani yang berkualitas. Dalam hubungan kemitraan, maka sub-sistem ini dapat melakukan perannya antara lain: memberikan pelayanan yang bermutu kepada usahatani,



Gambar 1. Konsep Perusahaan dan Sistem agribisnis

- memberikan bimbingan teknis produksi, memberikan bimbingan manajemen dan hubungan sistem agribisnis, memfasilitasi proses pembelajaran atau pelatihan bagi petani, menyaring dan mensintesis informasi agribisnis praktis untuk petani, mengembangkan kerjasama bisnis (kemitraan) untuk dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak;
- (2) sub-sistem produksi usahatani sebagai produsen pertanian berfungsi melakukan kegiatan teknis produksi agar produknya dapat dipertanggung jawabkan baik secara kualitas maupun kuantitas. Mampu melakukan manajemen agribisnis secara baik agar proses produksinya menjadi efisien sehingga mampu bersaing di pasar. Petani umumnya memerlukan penyuluhan dan informasi agribisnis, teknologi dan inovasi lainnya dalam proses produksi, bimbingan teknis atau pendampingan agar petani dapat melakukan proses produksi secara efisien dan bernilai tambah lebih tinggi;
- (3) sub-sistem pengolahan dan industri hasil pertanian berfungsi melakukan pengolahan lanjut (baik tingkat primer, sekunder maupun tersier) untuk mengurangi susut nilai atau meningkatkan mutu produk agar dapat memenuhi kebutuhan dan selera konsumen;
- (4) sub-sistem pemasaran dan perdagangan berfungsi memperlancar pemasaran hasil melalui perencanaan sistem pemasaran yang baik; dan
- (5) sub-sistem kelembagaan penunjang (penyuluhan, penelitian, informasi agribisnis, pengaturan, kredit modal, transportasi, dan lain-lain) berfungsi menyediakan layanan bagi kebutuhan pelaku sistem agribisnis untuk memperlancar aktivitas perusahaan dan sistem agribisnis. Masing-masing komponen jasa penunjang itu mempunyai karakteristik fungsi yang berbeda, namun intinya adalah agar mereka dapat berbuat sesuatu untuk

mengurangi beban dan meningkatkan kelancaran penyelenggaraan sistem agribisnis.

Kegiatan agribisnis merupakan (a) kegiatan yang berbasis pada keunggulan sumberdaya alam (*on-farm agribusiness*) yang terkait erat dengan penerapan teknologi dan keunggulan sumberdaya manusia bagi perolehan nilai tambah yang lebih besar (*off-farm agribusiness*); serta (b) kegiatan yang memiliki ragam kegiatan dengan spektrum yang sangat luas, dari skala usaha kecil dan rumah tangga hingga skala usaha raksasa, dari yang berteknologi sederhana hingga yang paling canggih, yang kesemuanya itu saling terkait dan saling mempengaruhi. Dalam usaha mempercepat laju pertumbuhan sektor agribisnis terutama dihadapkan dengan kondisi petani kita yang serba lemah (modal, skill, pengetahuan dan penguasaan lahan) dapat ditempuh melalui penerapan sistem pengembangan agribisnis (*system of development agribusiness*).

Dalam konteks bahasan ini, yang dimaksud “sistem pengembangan

agribisnis” adalah suatu bentuk atau model atau sistem atau pola pengembangan agribisnis yang mampu memberikan keuntungan layak bagi pelaku-pelaku agribisnis (petani/pengusaha kecil dan menengah/koperasi), berupa peningkatan pendapatan, peningkatan nilai tambah dan perluasan kesempatan kerja. Jika dikaji lebih jauh tujuan dan sasaran “sistem pengembangan” yang diterapkan di sektor pertanian, pada hakekatnya adalah pengembangan sektor pertanian dalam arti luas secara menyeluruh dan terpadu, yakni tidak hanya peningkatan produksi, tetapi juga pengadaan sarana produksi, pengolahan produk, pengadaan modal usaha dan pemasaran produk secara bersama atau bekerjasama dengan pengusaha. Sistem pengembangan sektor pertanian semacam ini, jika menggunakan istilah sekarang, tidak lain adalah pengembangan pertanian berdasarkan agribisnis, atau dengan kata lain pengembangan agribisnis (Saragih, 1999).

Dalam konteks pengembangan agribisnis sayuran dataran tinggi, Simatupang (1995) mengemukakan bahwa struktur agribisnis yang bersifat dualistik menyebabkan munculnya masalah transmisi, yang mencakup tiga aspek strategis: (1) Terjadinya transmisi harga yang tidak simetris, penurunan harga ditransmisikan dengan cepat dan sempurna ke petani, sedangkan kenaikan harga ditransmisikan dengan lambat dan tidak sempurna; (2) Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh agribisnis hilir tidak ditransmisikan ke agribisnis hulu yaitu petani; (3) Modal investasi yang relatif lebih banyak dimiliki oleh agribisnis hilir tidak disalurkan dengan baik dan bahkan cenderung digunakan untuk mengeksploitasi agribisnis hulu.

Struktur agribisnis sayuran yang berkembang saat ini dapat digolongkan sebagai tipe dispersal atau tersekat-sekat. Struktur agribisnis demikian kurang memiliki daya saing, karena tiga faktor utama (Irawan, 2003): (1) Tidak ada keterkaitan fungsional yang harmonis antara setiap kegiatan

agribisnis dengan kegiatan lainnya karena masing-masing pelaku agribisnis mengambil keputusan sendiri-sendiri dalam menjalankan usahanya, konsekuensinya adalah dinamika pasar tidak selalu dapat direspon secara efektif karena tidak adanya koordinasi; (2) terbentuknya margin ganda menyebabkan ongkos produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil yang harus dibayar konsumen menjadi lebih mahal, sehingga sistem agribisnis berjalan tidak efisien dalam memenuhi kebutuhan pasar, margin ganda tersebut dapat bersumber dari rantai pemasaran yang panjang dan transmisi harga/informasi pasar yang tidak sempurna kepada petani. (3) tidak adanya kesetaraan posisi tawar antara petani dengan pelaku agribisnis lainnya, sehingga petani sulit mendapatkan harga pasar yang wajar dan sebagian besar nilai tambah tidak dapat dinikmati oleh petani, konsekuensinya adalah petani sulit melakukan pemupukan modal dan sulit memenuhi tuntutan permintaan atau preferensi konsumen yang terus berubah.

Pujiharto (2002) menyebutkan bahwa ciri-ciri sistem agribisnis sayuran dataran tinggi di Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut: (1) skala usaha dan penggunaan modal kecil, (2) penerapan teknologi usahatani belum optimal, (3) penggunaan pestisida untuk pengendalian hama dan penyakit terlalu tinggi sehingga menyebabkan pemborosan dan akumulasi residu, (4) belum adanya keseimbangan antara *supply* dan *demand* dan kontinuitas produk (5) pemasaran hasil belum efisien, harga lebih banyak ditentukan oleh pedagang.

Akibat dari sistem produksi seperti tersebut adalah produktivitas dan produksi belum optimal, bersifat musiman, harga sangat fluktuatif, dan keamanan pangan produk sayuran kurang terjamin. Belum ditanganinya kegiatan pasca panen secara baik juga berakibat produk cepat rusak dan tingkat kehilangan hasil tinggi. Kebijakan pemerintah ke arah penyediaan infrastruktur pasar yang memadai seperti Sub Terminal Agribisnis (STA) sangat menunjang

bagi pengembangan komoditas sayuran dataran tinggi.

Upaya pengembangan agribisnis sayuran dataran tinggi di Kabupaten Banjarnegara diperlukan langkah-langkah nyata antara lain: (1) Mengembangkan program pola tanam antar sentra produksi, melaksanakan pembinaan *on farm* dan *off farm* di kawasan sentra produksi; (2) Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan domestik dan ekspor; (3) Mengoptimalkan berbagai infrastruktur yang telah dibangun (jalan, sub terminal agribisnis, pasar pertanian dan *cold storage*); (4) Mengembangkan perbenihan baik oleh pemerintah maupun swasta; (5) Melaksanakan pembinaan kelembagaan; dan (6) Membuka kerjasama regional maupun ekspor.

Perubahan lingkungan strategis berupa globalisasi ekonomi-liberalisasi perdagangan, otonomi daerah, perubahan preferensi konsumen, serta kelestarian lingkungan menuntut adanya perubahan pengembangan agribisnis. Pengembangan agribisnis

yang tangguh di perlukan empat pilar penunjang (Suwandi, 1995): (1) Eksistensi semua komponen agribisnis secara lengkap di kawasan sentra produksi; (2) Pentingnya kemitraan usaha antar pelaku agribisnis; (3) Iklim usaha yang kondusif; dan (4) Adanya gerakan bersama dalam memasyarakatkan agribisnis. Dalam rangka meningkatkan daya saing produk sayuran dataran tinggi di daerah sentra produksi, diperlukan kebijakan-kebijakan untuk memperkuat kemitraan usaha.

Pengembangan agribisnis sayuran dataran tinggi di Kabupaten Banjarnegara harus dilakukan dengan pendekatan komprehensif, yaitu memperhatikan keseluruhan aspek dan segmen agribisnis dari hulu kehilir dan perangkat penunjangnya, serta menuju keseimbangan antara usaha promosi peningkatan produksi, konsumsi dan distribusi yang menguntungkan semua pihak. Selain peningkatan produksi, strategi pengembangan agribisnis sayuran dataran tinggi juga mencakup peningkatan kualitas produk,

pengembangan kelembagaan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan peningkatan akses pasar.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Agribisnis sayuran dataran tinggi dengan penggerak *on farm agribusiness* adalah alternatif utama yang sangat potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Banjarnegara, hal ini didukung dengan potensi wilayah, penduduk, produksi serta sarana dan prasarana pendukung.
2. Tantangan pengembangan agribisnis sayuran dataran tinggi pada era otonomi daerah dan era globalisasi-liberalisasi membawa konsekuensi bahwa produk sayuran dataran tinggi harus dapat bersaing di pasar global..
3. Permasalahan pokok pengembangan agribisnis sayuran dataran tinggi di Kabupaten Banjarnegara meliputi aspek teknis produksi, kelembagaan dan pemasaran.

4. Pola kemitraan usaha sayuran dataran tinggi di Kabupaten Banjarnegara adalah pola dagang umum dan pola kemitraan pembinaan-kredit bibit kentang antara PT. Indofood Fritolay Makmur dengan petani.
5. Konsep pengembangan agribisnis sayuran dataran tinggi di Kabupaten Banjarnegara harus dilaksanakan secara komprehensif dengan memperhatikan keseluruhan aspek dan segmen agribisnis dari hulu ke hilir dan perangkat penunjangnya.

Implikasi Kebijakan

Pengembangan agribisnis sayuran dataran tinggi di Kabupaten Banjarnegara harus menyesuaikan perubahan lingkungan strategis berupa globalisasi ekonomi-liberalisasi perdagangan, otonomi daerah, perubahan preferensi konsumen, serta kelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. 2009. Survei Pertanian. Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan di Indonesia. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- BPS Kabupaten Banjarnegara. 2009. Produksi Tanaman Sayuran Dataran Tinggi. Badan Pusat Statistik Kabupaten, Banjarnegara .
- BPS Propinsi Jawa Tengah. 2010. Produksi Komoditas Hortikultura Jawa Tengah. Badan Pusat Statistik, Semarang.
- Departemen Pertanian. 2001. Pembangunan Sistem agribisnis Sebagai Penggerak Ekonomi Nasional. Edisi Pertama. Jakarta.
- Departemen Pertanian. 2006. Kebijakan Pertanian dan Dukungan Departemen Pertanian terhadap Implementasi Otonomi Daerah.
- Departemen Pertanian. 2009. <http://www.hortikultura.deptan.go.id/index.php>.
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Banjarnegara. 2005. Arah dan Strategi Pengembangan Komoditas Hortikultura di Kabupaten Banjarnegara
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Banjarnegara. 2007. Pengembangan Komoditas Sayuran Dataran Tinggi di Kabupaten Banjarnegara. Rancangan Usulan Rapat dengan DPRD Kabupaten Banjarnegara.

- Direktorat Jenderal Tanaman Hortikultura Departemen Pertanian. 2008. Statistik Tanaman Sayur-sayuran. Jakarta.
- Downey, W. David and Steven, P. Erickson. 1992. Manajemen Agribisnis. Ed. Ke-2, Cet. Ke-3. R. Ganda.S. dan A. Sirait, Penerjemah. Jakarta: Erlangga Terjemahan dari: *Agribusiness Management*. Mc Graw-Hill Book Company, New York, Second Edition.
- Irawan, B. 2003. Agribisnis Hortikultura: Peluang dan Tantangan Dalam Era Perdagangan Bebas. Jurnal Sosial-Ekonomi Pertanian dan Agribisnis, Vol. 3 No.2 :107-209. Juli 2003. Fakultas Pertanian Unevirsitas Udayana.
- Kabupaten Banjarnegara dalam Angka. 2009. Profil Kabupaten Banjarnegara. Pemda Banjarnegara.
- Pujiharto. 2002. *The Influence of Integrated Pest Mangement on Cabbage Agribusiness to Farmer's Income, Profit and Economical Efficiency in Banjarnegara Regency*. Tesis Grant SEAMEO-SEARCA. Los Banos, Philipphines.
- Pujiharto. 2011. Agribisnis Sayuran Dataran Tinggi di Kabupaten Banjarnegara. Laporan Survey Awal Penelitian untuk Disertasi. Tidak dipublikasikan. Program Doktor Eonomi Pertanian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Rachman, H.P.S., 1997. Aspek Permintaan, Penawaran, dan Tataniaga Hortikultura di Indonesia. Forum Penelitian Agroekonomi, Volume 15 No. 1 & 2, Desember 1997. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Bogor.
- Saptana, M. Siregar, S. Wahyuni, Saktyanu K.D., E. Ariningsih, V. Darwis. 2005. Pemantapan Model Pengembangan Kawasan Agribisnis Sayuran Dataran Tinggi Sumatera (KASS). Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Bogor.
- Saragih, Bungaran. 1999. Kumpulan Pemikiran Agribisnis: Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian. Yayasan Persada Mulia Indonesia.

-
- Simatupang, P. 1995. Industrialisasi Pertanian Sebagai Strategi Agribisnis dan Pembangunan Pertanian Dalam Era Globalisasi. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Bogor.
- Suwandi. 1995. Strategi Pola Kemitraan Dalam Menunjang Agribisnis Bidang Peternakan *dalam* Industrialisasi Usaha Ternak Rakyat Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi, Prosiding Simposium Nasional Kemitraan Usaha Ternak. Ikatan Sarjana Ilmu-Ilmu Peternakan Indonesia (ISPI) bekerja dengan Balai Penelitian Ternak, Ciawi-Bogor.